

**PERAN DINAS PU DALAM PENGAWASAN PROYEK JALAN  
DI DESA BARANA KECAMATAN BANGKALA BARAT  
KABUPATEN JENEPONTO**

**RAMLAH**

**Nomor Stambuk : 10564 01101 10**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2014**

**PERAN DINAS PU DALAM PENGAWASAN PROYEK JALAN  
DI DESA BARANA KECAMATAN BANGKALA BARAT  
KABUPATEN JENEPONTO**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Pemerintahan

RAMLAH

Nomor Stambuk : 10564 01101 10

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2014**

## **PERSETUJUAN**

Judul Proposal Penelitian : Peran Dinas PU Dalam Pengawasan Proyek Jalan  
Di Desa Barana Kecamatan Bangkala Barat  
Kabupaten Jeneponto.

Nama Mahasiswa : Ramlah

Nomor Stambuk : 105640 1101 10

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dra. Hj. St. Nurmaeta, M.M**

**Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si**

Mengetahui :

Dekan Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fisipol Unismuh Makassar

**Dr. H. Muhlis Madani, M.Si**

**A.Luhur Prianto, S.IP, M.Si**

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ramlah

Nomor Stambuk : 105640 1101 10

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, Juli 2014

Yang Menyatakan,

Ramlah

## ABSTRAK

**RAMLAH, Peran Dinas PU Dalam Pengawasan Proyek Jalan Di Desa Barana Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto,** (dibimbing oleh Hj. St. Nurmaeta, dan Nuryanti Mustari)

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana Peran PU (Dinas Pekerjaan Umum) dalam pengawasan proyek jalan khususnya di Desa Barana Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto yang kurang perhatian pemerintah mulai dari pengawasan yang kurang serta infrastruktur yang mengalami kerusakan.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan dua macam data yaitu data primer dan data sekunder. Data kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis dan selanjutnya ditampilkan dalam bentuk kalimat sesuai dengan hasil wawancara dari beberapa informan yang sebelumnya telah dicantumkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran PU (Pekerjaan Umum) dalam pengawasan jalan adalah kurang optimal disebabkan sistem pengawasan yang kurang serta infrastruktur mengalami kerusakan sebagai penunjang pengawasan jalan tidak diperhatikan lagi, yang meliputi tindakan pengawasan, dengan cara melakukan penyesuaian lokasi atau lapangan dengan perencanaan serta mobilitas yang terdiri atas peralatan dan material dilokasi kegiatan serta adanya tindakan pengawasan dengan cara pekerjaan perkerasan dan pengaspalan dengan melakukan uji lab, pengaspalan dan opname pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam tindakan pengawasan proyek jalan di Desa Barana.

***Keyword: Proyek Jalan, Dinas Pekerjaan Umum, Pengawasan***

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*“Assalamu Alaikum warahmatullahi Wabarakatuh”*

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah AWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Dinas PU Dalam Pengawasan Proyek Jalan Di Desa Barana Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pula pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Dra. Hj. St. Nurmaeta, M.M selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Drs. Muhlis Madani, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak A.Luhur Prianto S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Kedua orang tua dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moral maupun materil.
5. Untuk teman-teman Ilmu Pemerintahan angkatan 2010 yang sama-sama berjuang untuk memperoleh gelar sarjana.

Demikian kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, Juni 2014

Ramlah

## DAFTAR ISI

Halaman pengajuan skripsi .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....	iii
Abstrak .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Dinas Pekerjaan Umum .....	6
B. Pengawasan .....	7
1. Pengertian pengawasan .....	7
2. Penilaian pelaksanaan proyek jalan .....	10
3. Kegiatan monitoring proyek jalan .....	11
4. Evaluasi pengawasan pekerjaan .....	16
C. Tugas pokok dan struktur organisasi Bina Marga .....	22
1. Kepala dinas .....	22
2. Sekretariat .....	22
3. Bidang perencanaan dan pengendalian .....	23
4. Bidang pembangunan .....	24
5. Bidang pemeliharaan .....	25
6. Bidang operasional dan peralatan perbekalan .....	26
D. Klasifikasi jalan .....	27
E. Kerangka fikir .....	29
F. Fokus penelitian .....	31
G. Definisi fokus penelitian .....	31



### **BAB III. METODE PENELITIAN**

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian .....	34
B. Jenis dan tipe penelitian.....	34
C. Sumber data.....	35
D. Informan penelitian.....	35
E. Teknik pengumpulan data .....	36
F. Teknik analisis data .....	36
G. Keabsahan data .....	37

### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	39
B. Peran Dinas PU dalam pengawasan jalan di Desa Barana Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto .....	47
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi pengawasan jalan di Desa Barana Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto .....	56

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	71

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
-----------------------------	-----------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak akan pernah terlepas dari berbagai kegiatan, kegiatan-kegiatan tersebut menyangkut salah satu didalamnya adalah pekerjaan yang menjadi modal utama masyarakat dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari. Sudah menjadi pendapat umum jenis apapun pekerjaan di dunia ini senantiasa memerlukan suatu teknik atau dengan kata lain cara yang tepat sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan memberikan hasil yang sesuai dengan jumlah atau kuantitas yang telah diharapkan dan memiliki kualitas atau mutu berdasarkan standar yang telah di tentukan sebelumnya salah satunya adalah pekerjaan proyek jalan.

Semua orang sepakat bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat mendukung dalam tercapainya suatu pekerjaan (pekerjaan proyek jalan) agar pekerjaan tersebut memberikan hasil yang maksimum. Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu Pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Di dalam suatu organisasi terdapat tipe-tipe pengawasan yang digunakan, seperti pengawasan Pendahuluan (*preliminary control*), Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*cocurrent control*), Pengawasan Feed Back (*feed back control*). Di dalam proses

pengawasan juga diperlukan tahap-tahap pengawasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tahap-tahap pengawasan tersebut terdiri dari beberapa macam, yaitu tahap penetapan standar, tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan dan tahap pengambilan tindakan koreksi.

Suatu Organisasi juga memiliki perancangan proses pengawasan, yang berguna untuk merencanakan secara sistematis dan terstruktur agar proses pengawasan berjalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau direncanakan. Untuk menjalankan proses pengawasan tersebut dibutuhkan alat bantu manajerial dikarenakan jika terjadi kesalahan dalam suatu proses dapat langsung diperbaiki. Selain itu, pada alat-alat bantu pengawasan ini dapat menunjang terwujudnya proses pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan. Pengawasan juga meliputi bidang-bidang pengawasan yang menunjang keberhasilan dari suatu tujuan organisasi diantaranya.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Fungsi perencanaan pada dasarnya adalah suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil-hasil yang diinginkan. Fungsi pengawasan adalah upaya yang sistematis oleh manajemen untuk meneliti apakah pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dan kebijakan yang ditentukan oleh pimpinan.

Warga tujuh dusun di Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Jeneponto mengeluhkan buruknya infrastruktur jalan desa mereka. Sangat rusak dan menyiksa penggunaannya. Warga berharap Pemkab Jeneponto sedikit peduli dengan kondisi tersebut. Mereka berharap Dinas Pekerjaan Umum bisa membangun jalan yang lebih layak. Apalagi, sudah puluhan tahun warga di tujuh dusun itu harus menikmati jalan rusak. beberapa titiknya bahkan seperti kubangan kubangan saat musim hujan. Saat kemarau, berdebu karena tidak diaspal.

Jalan desa yang rusak sepanjang delapan kilometer. Menghubungkan kota kecamatan, jalan kabupaten, dan desa lain. Warga juga mulai kesal karena selama ini hanya dijanji berulang kali, tanpa realisasi. Ketujuh dusun yang menikmati jalan rusak selama puluhan tahun ini adalah Parang Labbua, Kalongkong, Bonto Parang, Mattoanging, Tombolo, Tanete, Bonto Kassi.

Proses pelaksanaan aktivitas kelembagaan yang berdasarkan dengan moralitas tentunya sangat mendukung kelancaran pelaksanaan pengawasan di suatu pihak. Proses penyelenggaraan pengawasan secara moralitas mempunyai dimensi- dimensi dan ruang tertentu, dari segi dimensi waktu dalam pengawasan tentunya mempunyai aspek kekinian visi masa depan yang lebih menguntungkan, pengawasan proyek jalan misalnya. Pengawasan padahal yang paling penting dalam suatu pekerjaan proyek jalan karena dengan adanya pengawasan pekerjaan

proyek jalan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, tetapi pengawasan terkadang tidak didasari suatu kebenaran yang sesungguhnya, oleh karena itu penulis mengangkat judul Peran Dinas PU dalam Pengawasan Proyek Jalan Di Desa Barana Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis mengambil rumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimana Peran Dinas PU Dalam Pengawasan Proyek Jalan Di Desa Barana Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto ?
- b. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat Peran Dinas PU dalam Pengawasan Proyek Jalan di Desa Barana Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Peran Dinas PU Dalam Pengawasan Proyek Jalan Di Desa Barana Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat peran Dinas PU dalam Pengawasan Proyek Jalan di Desa Barana Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

##### **a. Kegunaan Praktis**

1. Untuk memperdalam pemahaman peneliti mengenai peran Pemerintah dalam pengawasan proyek jalan.
2. Untuk mengkaji suatu permasalahan dalam hal pengawasan proyek jalan oleh Dinas PU.
3. Memberikan informasi kepada pembaca faktor pendukung dan faktor penghambat tentang peran dinas PU dalam Pengawasan Proyek Jalan.

##### **b. Kegunaan Teoritis**

1. Sebagai bahan referensi bagi lembaga khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah sehingga dijadikan sebagai sarana pengembangan wawasan keilmuan terutama bidang Pemerintahan.
2. Menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengangkat judul yang serupa dan kemudian dikembangkan dan diarahkan pada pemecahan masalah yang lebih komprehensif dan konstruktif.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Dinas Pekerjaan Umum**

Peraturan Menteri PU Nomor 08/PRT/M/2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dinas pekerjaan umum yaitu pelaksanaan otonomi daerah dibidang pekerjaan umum, dipimpin oleh kepala dinas PU yang tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

##### **1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PU**

Tugas PU melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Fungsi Dinas Pekerjaan Umum yaitu; a) Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pekerjaan umum sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah; b) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum; c) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum; d) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang penataan ruang; e) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang sumber daya air; f) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang kebinamargaan; g) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang keciptakaryaan; h) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; i) Pelaksanaan unit pelaksana teknis dinas; j) Pembinaan kelompok jabatan fungsional; k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## 2. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum

### a. Visi

Mewujudkan pemerintahan yang baik dan penguatan daya saing daerah menuju masyarakat Jeneponto yang sejahtera.

### b. Misi

- 1) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip good governance
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- 3) Membangun kemandirian ekonomi masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya daerah yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat berkelanjutan dan aspek kelestarian lingkungan yang bertumpu pada potensi lokal
- 4) Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan, dan akuntabel;
- 5) Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di setiap desa/kelurahan yang merujuk pada prinsip pengembangan tata ruang dan lingkungan pemukiman yang berkelanjutan;
- 6) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama;

## **B. Pengawasan**

### 1. Pengertian Pengawasan

Pengertian Pengawasan menurut Siagian dalam Makmur (2011:176) yang mengatakan pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan sebelumnya.



Sedangkan pengawasan menurut Victor M. Situmorang (1994) pengawasan adalah setiap usaha dari tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Berdasarkan argumentasi diatas dapat disimpulkan tentang pengertian pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumberdaya yang tersedia secara baik dan benar sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results.* Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan . *The process of ensuring that actual activities conform the planned activities.*

Menurut Winardi (2013) “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan”. Sedangkan menurut Basu Swasta “Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan”. Sedangkan menurut Komaruddin “Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual

rencana, dan awal Untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti”.

Nawawi dalam Rahman (2012) pengawasan atau control diartikan sebagai proses mengukur (*measurement*) dan menilai (*evaluation*) tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Fungsi pengawasan menurut Makmur (2012) yaitu:

- a. Eksplanasi, pengawasan menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program yang dicanangkan berbeda.
- b. Akuntansi, pengawasan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan sosial ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakannya sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu.

- c. Pemeriksaan, pengawasan membantu menentukan apakah sumberdaya dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu memang telah sampai kepada mereka.

Kepatuhan, pengawasan bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan dari para administrator program, staf dan pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur yang dibuat oleh legislator, instansi pemerintah dan atau lembaga profesional.

## 2. Penilaian Pelaksanaan Proyek Jalan

### a. Tindakan Pengawasan

Dasar proses pengawasan adalah apa yang akan diawasi dan bagaimana caranya melaksanakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan suatu kegiatan yang kemudian dilakukan perbandingan dengan rencana awalnya. Secara sistem, penilaian pelaksanaan proyek terdiri dari tiga langkah yaitu:

- 1) Mengawasi sesuai standar, ukuran yang ditetapkan,
- 2) Mengadakan pengukuran atau penialian pelaksanaan,
- 3) Menghitung nilai deviasi dengan cara membandingkan antara pelaksanaan dengan standar dan rencana.

### b. Laporan-laporan

Pelaporan adalah metode pengawasan yang diterapkan sebagai realisasi dari pertanggung jawaban. Praktek pelaporan dapat dilakukan yaitu sebagai berikut:

### 1) Metode laporan lisan

Laporan lisan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan misalnya setiap dua hari sekali sebelum memulai bekerja. Laporan lisan dapat disampaikan secara langsung atau melalui telepon, telex dan radio. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan mengadakan rapat. Dengan memperhatikan keadaan, laporan lisan dapat diikuti dengan peninjauan karena dengan adanya komunikasi langsung, maka dapat segera di selesaikan masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan.

### 2) Metode laporan tertulis

Metode laporan banyak dilakukan untuk pengawasan jalannya pelaksanaan proyek. Untuk memperlancar cara penyusunan serta pencapaian sasaran pengawasan, maka dibuat formulir laporan disertai dengan pedoman tatacara pengisiannya. Dengan cara tersebut, maka formulir mudah dipelajari dan juga pengisiannya. Formulir laporan yang telah distandarkan sangat menguntungkan dalam proses pengolahan data karena dapat menggunakan alat bantu computer.

## 3. Kegiatan Monitoring Proyek Jalan

Kegiatan monitoring proyek jalan yaitu sebagai berikut:

### a. Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan

inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah.

b. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

Pengawasan represif adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.” Pengawasan model ini lazimnya

dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

c. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.” Di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.” Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.”

d. Pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) dan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*).

Pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparaturnya atau pegawai negeri.” Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.

Jenis-jenis pengawasan (Makmur 2011:186) yaitu:

- a. Pengawasan fungsional. Kelembagaan atau organisasi apa pun bentuknya besar maupun kecil senantiasa membutuhkan pengawasan, tetapi kelembagaan yang bentuknya kecil pengawasan yang dilakukan tidak perlu secara fungsional, tetapi kelembagaan yang bentuknya besar, seperti kelembagaan Negara dengan aktifitas yang begitu rumit dan kompleks, maka sangat dibutuhkan jenis pengawasan yang sifatnya fungsional dengan menggunakan tenaga kerja manusia yang memiliki pengetahuan khusus dan pekerjaan khusus di bidang pengawasan.
- b. Pengawasan masyarakat. Penyelenggaraan pengawasan masyarakat ditujukan kepada pemerintah sebagai penyelenggara Negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan terutama penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah atas nama Negara. Secara realitas bahwa yang paling banyak melakukan penyalahgunaan sumber daya Negara adalah penguasa, terutama penyelenggara pemerintah, misalnya manipulasi pajakk, keuangan dan sebagainya.
- c. Pengawasan administratif. Tujuan pengawasan administratif dalam kelembagaan khususnya bagi kelembagaan publik agar pendataan dan pembagian atau pendistribusian suatu kegiatan atau pekerjaan dilakukan dengan berdasarkan kepada keadilan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelembagaan yang sangat dibutuhkan penerapan atau pelaksanaan pengawasan secara administratif agar supaya kegiatan kelembagaan dapat berjalan sesuai harapan.

- d. Pengawasan teknis. Selain pekerjaan dalam sebuah kelembagaan atau organisasi yang berkaitan dengan kegiatan administratif, sesungguhnya yang tidak kalah pentingnya adalah kegiatan teknis karena jenis pekerjaan ini akan dapat memberikan hasil sesuai dengan kebutuhan manusia, misalnya pekerjaan pertanian, pekerjaan dibidang perikanan, pekerjaan dibidang industry, dan lain sebagainya, yang bersifat pekerjaan teknis.
- e. Pengawasan pimpinan. Sebagai unsur yang dipimpin berfungsi untuk melaksanakan kegiatan atau pekerjaan yang diberikan oleh unsur pemimpin, sedangkan unsur pemimpin memiliki tugas untuk melakukan pengawasan kepada yang dipimpinya agar pekerjaan yang dilaksanakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya kemungkinan pemborosan yang dapat berakibat merugikan anggota kelembagaan itu sendiri.
- f. Pengawasan barang, pengawasan barang berarti suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk menjamin terhadap keamanan suatu barang maupun akan memberikan manfaat kepada pelaksanaan tugas kelembagaan yang memiliki hak tentang barang tersebut.
- g. Pengawasan jasa. Jasa adalah suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang menjadi anggota kelembagaan, jasa dari pihak ketiga atau sebaliknya, tidak akan berjalan sebagaimana mestinya jika tidak ada pengawasan yang dilakukan secara baik dan tegas, apalagi hasil jasa itu untuk memberikan nilai sangat berharga pada seseorang atau beberapa orang dalam kehidupannya, sehingga ada kemungkinan untuk dimiliki secara pribadi.



- h. Pengawasan internal. Kelembagaan memiliki jangkauan luas dan bentuk sub-sub kelembagaan didalamnya, misalnya kelembagaan eksekutif, yudikatif, legislatif, auditif, dan semacamnya. Kelembagaan yang dibentuk dalam kelembagaan itu sendiri untuk mengamankan dalam rangka memperlancar penyelenggaraan tugas.
- i. Pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan secara legitimasi oleh lembaga pengawas di luar sub kelembagaan tertentu, misalnya di Negara Indonesia lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan keuangan Negara adalah BPK Badan Pengawas Negara (BPK).

#### 4. Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan

##### a. Prinsip-prinsip pengawasan

Prinsip-prinsip Pengawasan menurut Sari (2012) adalah sebagai berikut:

- 1) Pengawasan harus berorientasi kepada tujuan organisasi
- 2) Pengawasan harus obyektif, jujur, dan mendahulukan kepentingan umum
- 3) Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan-peraturan yang berlaku (*wetmatigheid*)
- 4) Pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna pekerjaan
- 5) Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti (*accurate*) dan tepat.
- 6) Pengawasan harus bersifat terus-menerus (*continue*).

7) Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik (feed-back) terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan dan kebijaksanaan waktu yang akan datang.

#### b. Syarat-syarat Pengawasan

Syarat-syarat Pengawasan umum dapat dipergunakan sebagai berikut:

- 1) Menentukan standar pengawasan yang baik dan dapat dilaksanakan.
- 2) Menghindarkan adanya tekanan, paksaan, yang menyebabkan penyimpangan dari tujuan pengawasan itu sendiri.
- 3) Melakukan koreksi rencana yang dapat digunakan untuk mengadakan perbaikan serta penyempurnaan rencana yang akan datang.

#### c. Teknik-teknik Pengawasan

Tata nilai dalam kehidupan kelembagaan senantiasa berorientasi kepada masyarakat yang akan datang, pentingnya peranan teknik-teknik pengawasan agar tata nilai dalam kehidupan kelembagaan dapat terpelihara dengan baik dan dalam melaksanakan berbagai anggota kelembagaan mentaati tata nilai tersebut.

Langkah-langkah dalam pengawasan Makmur (2011:192) yaitu sebagai berikut:

- a. Teknik pemantauan dalam pengawasan. Salah satu teknik melakukan pengawasan baik kepada para oknum yang melaksanakan kegiatan dalam berbagai kelembagaan maupun yang dilihat dari aspek pelaksanaan kegiatan adalah melakukan suatu pemantauan baik dilakukan secara langsung (*direct*) maupun dilakukan tidak secara langsung (*indirect*). Melalui laporan dalam pimpinan unit yang diberikan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan, teknik pemantauan dalam

pengawasan pemantauan semua lembaga membutuhkannya agar program yang telah direncanakan dapat di implementasikan dengan baik. Kekeliruan atau kesalahan dalam melakukan pemantauan termasuk penggunaan teknik berarti pengawasan yang dilakukan tersebut hasilnya bukan memberikan suatu kebenaran, tetapi kekeliruan yang berakibat negative pada orang yang diawasi.

- b. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan. Dengan melakukan pengawasan dibutuhkan suatu teknik pemeriksaan karena dengan melalui pemeriksaan dapat mnenutka suatu tindakan dalam melaksanakan suatu kegiatan berjalan dengan baik atau mengalami hambatan dalam pelaksanaanya maupun dpat memberikan hasil yang maksimal atau gagal dalam menciptakan hasil yang diharapkan.
- c. Teknik penilaian dalam pengawasan. Teknik penilaian sebagai bagian dari pada pengawasan terhadap pelaksanaan sesuatu kegiatan tentunya harus dilakukan secara tepat, adil, dan jujur dengan jiwa utamanya adalah kebenaran.
- d. Teknik wawancara dalam pengawasan. Tujuan wawancara dalam pengawasan berbeda dengan wawancara yang dilakukan terhadap kegiatan lainnya misalnya wawancara dalam bidang penelitian dan lain sebagainya, karena kalau tujuan wawancara dalam bidang pengawasan dalam rangka memperoleh informasi sehingga pengawas bisa menentukansuatu keyakinan kebenaran pelaksanaan sesuatu kegiatan apakah benar dalam kebenaran ataukah benar dalam kesalahan.

- e. Teknik pengamatan dalam pengawasan. Tujuan pengamatan dalam pengawasan untuk membuktikan antara informasi atau data yang diperoleh dengan keadaan yang sesungguhnya baik yang berkaitan dengan barang atau benda, maupun yang berkaitan dengan jasa dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terikat dalam sebuah kelembagaan.
- f. Teknik perhitungan dalam pengawasan. Perhitungan sangat memegang peranan penting dalam pengawasan karena salah satu teknik untuk menentukan daripada hasil pengawasan, kekeliruan dalam perhitungan berarti kesalahan hasil dalam pengawasan.
- g. Teknik analisis dalam pengawasan. Penggunaan teknis analisis dalam pengawasan merupakan suatu hal yang sangat menentukan kebenaran penyajian hasil daripada pengawasan, kekeliruan penyajian hasil pengawasan lebih banyak disebabkan oleh teknik analisis yang digunakan.
- h. Teknik laporan dalam pengawasan. Laporan merupakan salah satu obyek pelaksanaan pengawasan, yang menjadi masalah dalam pengawasan juga laporan merupakan pengawasan yang paling dipercaya.

##### 5. Tindak Lanjut

Tindak lanjut dari pengawasan proyek jalan adalah pemeliharaan jalan. Tujuan pemeliharaan jalan adalah untuk mempertahankan kondisi jalan mantap sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuannya pada saat jalan tersebut selesai dibangun dan dioperasikan sampai dengan tercapainya umur rencana yang telah ditentukan. Bertitik tolak dari kondisi mantap tersebut, pemeliharaan jalan perlu dilakukan secara terus-menerus/rutin dan berkesinambungan khususnya pada jenis konstruksi jalan yang menggunakan

sistem perkerasan lentur (flexible pavement). Pemeliharaan jalan tidak hanya pada perkerasannya saja, namun mencakup pula pemeliharaan bangunan pelengkap jalan dan fasilitas beserta sarana-sarana pendukungnya.

Suatu perkerasan jalan sekuat apapun tanpa didukung oleh fasilitas drainase akan dengan mudah menurun kekuatannya sebagai akibat dari melemahnya kepadatan lapisan pondasi dan terurainya butiran agregat dari bahan pengikatnya. Pemeliharaan saluran tepi di kiri-kanan badan jalan menjadi penting dan air harus senantiasa mengalir dengan lancar karena genangan air hujan akan melemahkan struktur perkerasan secara menyeluruh. Sedangkan retak rambut pada lapisan permukaan suatu perkerasan bila tidak segera ditutup akan semakin membesar dan dimasuki air hujan yang berdampak terurainya ikatan antara butiran agregat dari bahan pengikatnya, dan menjadi kerusakan yang lebih besar. Kondisi ini akan semakin cepat bertambah parah lagi bila beban lalulintasnya padat dan berat.

Penanganan pemeliharaan jalan dapat dilakukan secara rutin maupun berkala. Pemeliharaan jalan secara rutin dilakukan secara terus-menerus sepanjang tahun dan dilakukan sesegera mungkin ketika kerusakan yang terjadi belum meluas. Perawatan dan perbaikan dilakukan pada tahap kerusakan masih ringan dan setempat. Hal ini dilakukan sehubungan dengan biaya perbaikannya yang relatif rendah dan cara memperbaikinya pun relatif mudah/ringan.

Pemeliharaan jalan secara berkala dilakukan secara berkala dengan melakukan pula peremajaan terhadap bahan perkerasan maupun bahan lainnya. Selain itupun, dilakukan perataan kembali terhadap permukaan jalan. Baik pemeliharaan rutin maupun pemeliharaan berkala, tidak dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan struktur.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengendalian dan pengawasan pemeliharaan jalan perlu dilakukan secara rutin maupun berkala agar kerusakan jalan beserta bangunan pelengkap dan fasilitas pendukungnya sejak dini dapat dideteksi jenis dan volume serta cara penanganan yang harus dilakukan segera. Selain itu pun perlu diketahui lokasi kerusakannya, khususnya pada lokasi tertentu yang selalu terjadi kerusakan berulang.

Pengendalian dan pengawasan pekerjaan pemeliharaan jalan menjadi penting dalam upaya meningkatkan kemampuan dan pengembangan jaringan jalan yang telah mantap guna melayani lalu lintas transportasi darat dan daerah-daerah yang berkembang.

Kegiatan utama pemeliharaan jalan dibagi dalam beberapa kategori pemeliharaan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing bagian dari suatu konstruksi jalan. Bagian-bagian dari konstruksi jalan yang perlu dipelihara antara lain adalah sebagai berikut:

1. Struktur Perkerasan Jalan.
2. Bahu Jalan.
3. Fasilitas Pejalan Kaki/Trotoar.
4. Fasilitas Drainase Jalan.
5. Perlengkapan Jalan.
6. Lereng/Talud Jalan.
7. Struktur Pendukung Jalan.

Selain itu, kegiatan yang perlu dilakukan dalam keadaan mendesak/darurat adalah apabila terjadi bencana alam seperti tanah longsor, banjir, jalan dan jembatan terputus, pengaturan lalu lintas, dan lain-lain.

### **C. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Bina Marga**

Dinas Bina Marga mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di Bidang Bina Marga.

Susunan Organisasi Dinas Bina Marga Anonim (2013) yaitu:

#### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Bina Marga.

#### **2. Sekretariat**

Sekretariat, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga meliputi urusan umum, penyusunan program dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja dinas, pengumpulan dan pengolahan data.
- b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran, pertanggungjawaban keuangan
- c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.
- f. Penyiapan data dan informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi.

- g. Pelaksanaan evaluasi dan Penyusunan Laporan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### 3. Bidang Perencanaan dan Pengendalian

Bagian Sekretariat terdiri dari :

#### a. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
2. Melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol;
3. Melaksanakan tugas-tugas bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan;
4. Menghimpun dan menyusun dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan dan ketatalaksanaan serta memelihara dan pendistribusian;
5. Melakukan tata usaha pemeliharaan barang, perbekalan dan peralatan kantor;
6. Melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun yang dikuasai Dinas;
7. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian;
8. Menyusun formasi dan perencanaan pegawai;
9. Melaksanakan pengembangan karier peningkatan sumber daya manusia;
10. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
11. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.



b. Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan umum program Dinas;
2. Mempersiapkan penyusunan rencana umum kegiatan tahunan;
3. Menyusun rencana program alokasi anggaran Dinas;
4. Menyusun kebutuhan rumah tangga Dinas;
5. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
6. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

1. Menghimpun dan mengolah data anggaran;
2. Melaksanakan tata usaha keuangan anggaran dinas;
3. Memberikan bimbingan teknis tentang administrasi keuangan;
4. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban keuangan;
5. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
6. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

4. Bidang Pembangunan

Bidang pembangunan:mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga meliputi pembangunan jalan, penggantian jembatan serta peningkatan jalan,mempunyai fungsi yaitu :

- a. Penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan program dan estimasi biaya pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
- b. Pelaksanaan program kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
- c. Pelaksanaan penelitian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Bidang Pembangunan Jalan, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data untuk bahan pelaksanaan pembangunan jalan;
2. Menyusun pemutakhiran program-program dan estimasi biaya pelaksanaan pembangunan jalan;
3. Melaksanakan kegiatan pembangunan jalan;
4. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan;
5. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
6. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan.

#### 5. Bidang Pemeliharaan

Bidang pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga meliputi pemeliharaan jalan dan jembatan,

pemanfaatan jalan dan jembatan serta pengawasan jalan dan jembatan. Bidang pemeliharaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan program, estimasi biaya pemeliharaan jalan dan jembatan;
  1. Pelaksanaan program pemeliharaan jalan dan jembatan;
  2. Penelitian dan pengkajian dokumen teknik pemeliharaan jalan dan jembatan;
  3. Pelaksanaan pemanfaatan jalan dan jembatan serta pemberian rekomendasi perijinan;
  4. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian, pemanfaatan jalan dan jembatan serta penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan;
  5. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
  6. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
6. Bidang Operasional dan Peralatan Perbekalan

Bidang Operasional dan Peralatan Perbekalan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga meliputi pengawasan peralatan dan perbekalan, operasional peralatan dan perbekalan serta pemeliharaan peralatan dan perbekalan. Bidang operasional dan peralatan perbekalan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kebutuhan peralatan dan perbekalan;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pembekalan pemanfaatan peralatan dan perbekalan;
- c. Pengelolaan administrasi penggunaan peralatan dan perbekalan;
- d. Pengendalian penggunaan peralatan dan perbekalan;

- e. Pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan perbekalan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **D. Klasifikasi Jalan**

Menurut Pane (2012), Jalan dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum pasal 1 adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dinawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu : a. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum; b. Jalan Khusus adalah jalan selain jalan umum, seperti jalan perkebunan, jalan pertambangan, jalan inspeksi pengairan, jalan inspeksi saluran minyak dan gas, jalan kehutanan, jalan kompleks bukan umum, jalan untuk keperluan pertanahan dan keamanan (HANKAM).

Klasifikasi jalan berdasarkan perannya dalam Sistim Jaringan Jalan adalah sebagai berikut :

##### **1. Sistem jaringan jalan primer**

Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan yang berperan sebagai pelayanan jasa distribusi untuk pengembangan semua wilayah di tingkat Nasional dengan simpul jasa distribusi yang kemudian berwujud kota. Sistem jaringan jalan primer disusun mengikuti ketentuan pengaturan tata ruang dan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional, yang menghubungkan simpul-

simpul jasa distribusi yaitu; a). Dalam satuan wilayah pengembangan menghubungkan secara menerus kota jenjang kesatu, kota jenjang kedua, kota jenjang ketiga, dan kota jenjang dibawahnya sampai ke persil; b). Menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kesatu antar satuan wilayah pengembangan.

## 2. Sistem jaringan jalan sekunder

Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan yang berperan sebagai pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kota. Sistem jaringan jalan sekunder disusun mengikuti ketentuan pengaturan tata ruang yang menghubungkan kawasan-kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

### Klasifikasi Jalan berdasarkan kepada Kewenangan

Jalan Nasional : yaitu ruas jalan yang karena tingkat kepentingannya kewenangan pembinaannya berada pada Pemerintah Pusat. Adapun ruas-ruas jalan yang masuk kedalam klasifikasi adalah : Jalan Arteri Primer, Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar ibukota propinsi, jalan lainnya yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan nasional.

Jalan Daerah adalah jalan umum yang pembinaannya dilakukan pemerintah daerah setempat (Jalan Propinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota). Jalan Propinsi: yaitu ruas jalan yang berdasarkan tingkat kepentingannya kewenangan pembinaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I. Adapun jalan yang masuk kedalam klasifikasi ini adalah :

- a. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan ibukota propinsi dengan ibukota kabupaten/kota,.
- b. Jalan Kolektor yang menghubungkan ibukota kabupaten/kotamadya.
- c. Jalan lainnya yang mempunyai nilai strategis ditinjau dari segi kepentingan propinsi.
- d. Jalan yang ada di dalam daerah khusus ibukota Jakarta, kecuali yang ditetapkan sebagai jalan nasional.

Jalan Kabupaten/Kota: yaitu ruas jalan yang berdasarkan tingkat kepentingannya kewenangan pembinaannya diserahkan kepada Pemerintah Kota/Kabupaten. Adapun ruas-ruas jalan yang masuk ke dalam klasifikasi ini adalah

- a. Jalan Kolektor Primer yang tidak masuk ke dalam baik jalan nasional maupun jalan propinsi.
- b. Jalan Lokal Primer
- c. Jalan Sekunder yang tidak termasuk baik jalan nasional maupun jalan propinsi.
- d. Jalan lainnya yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan kota atau

Kabupaten

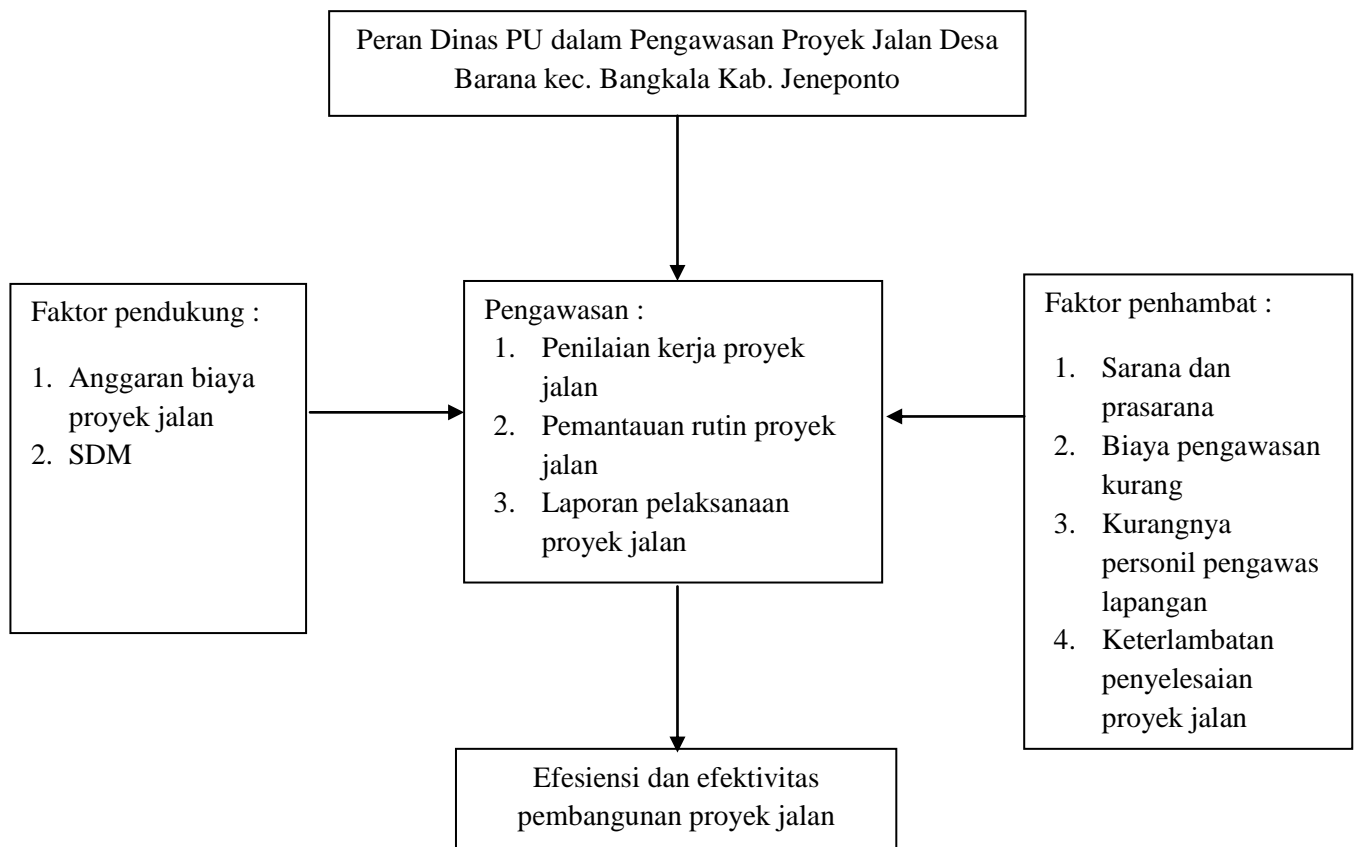
### **E. Kerangka Pikir**

Proses pelaksanaan aktivitas kelembagaan yang berdasarkan dengan moralitas tentunya sangat mendukung kelancaran pelaksanaan suatu pekerjaan, dan untuk kelancaran dari suatu pekerjaan dibutuhkan Pengawasan dari suatu pihak yang dapat membantu berjalannya suatu pekerjaan sesuai dengan yang

diharapkan. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pekerjaan proyek jalan misalnya yang sangat membutuhkan pengawasan untuk mendukung berjalannya suatu pekerjaan.

Jalan yang berperan sebagai pelayanan jasa distribusi untuk pengembangan semua wilayah di tingkat Nasional dengan simpul jasa distribusi yang kemudian berwujud kota. Jalan selama ini dikategorikan sebagai barang publik, kecuali Jalan Tol, tetapi jalan yang sering dilalui baik masyarakat desa maupun kota terkadang tidak sesuai dengan pengharapan sebelumnya yang akan bertahan lebih lama sesuai dengan yang diharapkan, dan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah kurangnya pemeliharaan pada jalan tersebut. Selain kurangnya pemeliharaan, kurangnya pengawasan juga sangat mempengaruhi. Oleh karena itu diperlukan peran Dinas PU dalam pengawasan proyek jalan guna menghindari terjadinya penyimpangan yang menyebabkan kerugian baik pemerintah daerah khususnya masyarakat setempat.

Keseluruhan uraian di atas dapat digambarkan sebagaimana kerangka alur pemikiran, pada gambar berikut ini.



## F. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian adalah peran dinas PU dalam pengawasan proyek jalan dengan indikator menfokuskan pada faktor pendukung dan faktor penghambat.

## G. Definisi Fokus Penelitian

1. Peran dinas PU merupakan fungsi pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang



sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Penilaian kerja proyek jalan adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan dinas bina marga yang bersangkutan untuk memberikan penilaian dari hasil kerja proyek jalan.
4. Pemantauan rutin proyek jalan adalah hal-hal yang harus diawasi dalam pelaksanaan suatu proyek jalan agar pekerjaan jalan sesuai dengan perencanaan dan bisa dikerjakan cepat waktu. Pemantauan rutin ini banyak macamnya, tergantung dari program atau kegiatan yang dilaksanakan.
5. Laporan pelaksanaan proyek jalan adalah hasil pelaksanaan pengawasan terhadap proyek jalan mulai dari anggaran yang dihabiskan sampai kualitas dari proyek jalan itu.
6. Faktor pendukung peran dinas PU dalam pengawasan proyek jalan ialah ketersediaan biaya, sumber daya manusia.
7. faktor penghambat peran dinas PU dalam pengawasan proyek jalan ialah sarana dan prasarana, biaya pengawasan kurang, kurangnya personil pengawas lapangan, keterlambatan proyek.
8. Proyek jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dinawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
9. Efisien adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya

dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat.

10. efektivitas adalah ukuran tingkat pemenuhan output atau tujuan proses. Semakin tinggi pencapaian target atau tujuan proses maka dikatakan proses tersebut semakin efektif.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu Penelitian mulai dari tanggal 20 Maret sampai 20 Mei 2014 demi tercapainya suatu yang sesuai apa yang diharapkan. Sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui sejauh mana peran dinas PU dalam pengawasan proyek jalan, maka lokasi penelitian ini adalah di Desa Barana Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini berupaya untuk memahami seberapa jauh peran Dinas PU dalam pengawasan proyek jalan. Penggunaan lebih dari satu pendekatan pengumpulan data memungkinkan evaluator menggabungkan kekuatan dan kebenaran dari suatu sumber data.

Hal ini berangkat dari pemaknaan pendekatan penelitian kualitatif itu sendiri dimana metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Tipe penelitian ini merupakan tipe penelitian Deskriptif Kualitatif (studi kasus) dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti, menginterpretasikan serta menjelaskan data secara sistematis. Dasar penelitian ini adalah wawancara, yaitu melakukan dialog

(wawancara) kepada informan yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian.

### C. Sumber Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi atau pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari bahan bacaan atau dokumentasi yang berhubungan dengan objek penelitian.

### D. Informan penelitian.

Informan kunci penelitian ini adalah Aparat Desa dan Masyarakat Desa Barana Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, Kepala dinas PU 1, Kepala bidang bina marga 1, kepala Desa 2, pengawas 2, tokoh masyarakat 4 jadi jumlah keseluruhan yaitu : 10 orang yang terdiri dari aparat desa dan masyarakat desa. adapun Informan yang mewakili sebagai berikut :

Tabel 1. Informan penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala dinas PU	1 Orang
2.	Kepala bidang bina marga	1 Orang
3.	Kepala Desa	2 Orang
4	Pengawas	2 orang
5.	Tokoh Masyarakat	4 orang
Total informan		10 orang

### **E. Teknik Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Wawancara (Interview)

Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan langsung kepada responden yang berkaitan dengan pengawasan proyek jalan di Desa Barana Kecamatan Bangkala Barat kabupaten Jeneponto.

#### 2. Pengamatan (Observasi)

Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap pengawasan proyek jalan di Desa Barana Kecamatan Bangkala Barat kabupaten Jeneponto.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.

### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang di lakukan adalah analisis deksriktif kualitatif dilakukan dengan menggambarkan data-data tentang peran Peran Dinas PU dalam Pengawasan Proyek Jalan Desa Barana Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto.

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode penelitian, karena dengan analisis dapat tersebut diberi makna dan arti yang

berguna dalam pemecahan masalah penelitian. Yakni analisis data disederhanakan sebagai berikut:

#### 1. Editing

Editing adalah meneliti kembali catatan setelah kembali dari lapangan. Data data diperoleh, dikumpulkan, direduksi, dipilih, kemudian data yang relevan dirangkum dengan permasalahan peneliti.

#### 2. Klasifikasi

Klasifikasi yaitu mengelompokkan data-data sesuai dengan masalah yang diteliti. Langkah ini dilakukan agar data yang telah diperoleh dapat dikelompokkan sehingga merefleksikan permasalahan yang ditentukan.

#### 3. Tabulasi Data

Tabulasi data yaitu menggolongkan data ke dalam kelompok-kelompok sehingga penelitian menjadi lebih terarah.

#### 4. Intrepretasi

Intrepretasi yaitu mencari data yang lebih luas dari data yang ada diolah bersamaan dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dihubungkan dengan teori ilmu pengetahuan yang berkorelasi dengan hal dimaksud.

### **H. Pengabsahan Data**

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keabsahan data penelitian kualitatif yaitu: nilai-nilai subyektifitas, metode pengumpulan data dan sumber data penelitian. Banyak hasil penelitian kualitatif diragukan kebenarannya karena beberapa hal, subyektifitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif, alat yang di andalkan adalah wawancara dan observasi mengandung

banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa kontrol, dan sumber data kualitatif kurang credible akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian.

Oleh karena itu dibutuhkan beberapa cara untuk meningkatkan keabsahan data penelitian kualitatif yaitu; kreadibilitas, transferabilitas dan komfirmabilitas.

1. Kreadibilitas apakah proses dan hasil penelitian dapat diterima dan dipercaya. Beberapa kriteria dalam menilai adalah lama penelitian, observasi yang detail, triangulasi, *perdebifering*, analisis kasus negatif, membandingkan dengan hasil penelitian lain, dan member check cara memperoleh tingkat kepercayaan hasil penelitian.
2. Transfabilitas yaitu apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan pada situasi yang lain. Defandibility yaitu apakah hasil penelitian mengacu kepada tingkat konsistensi peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk, dan menggunakan konsep-konsep ketika membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan.
3. Konfirmabilitas yaitu apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya dimana hasil penelitian dengan orang yang tidak ikut dan tidak berkepentingan dalam penelitian dengan tujuan agar hasil dapat lebih objektif.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

##### **1. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto**

###### **a. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Jeneponto.**

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto, Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Jeneponto mempunyai struktur Organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris Pekerjaan Umum
  - a. Sub. Bagian Umum
  - b. Sub. Bagian Keuangan
  - c. Sub. Bagian Program
- 3) Kepala Bidang Pengairan
  - a. Seksi Pembangunan Pengairan
  - b. Seksi Bina Manfaat, Operasi dan Pemeliharaan Pengairan
- 4) Kepala Bidang Bina Marga
  - a. Seksi pembangunan Jalan dan Jembatan
  - b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- 5) Kepala Bidang Cipta Karya
  - a. Seksi Pembangunan dan pemeliharaan air bersih



- b. Seksi Pembangunan dan pemeliharaan lingkungan perkotaan dan pedesaan
- 6) Kepala Bidang Bina Teknik
- a. Seksi Perencanaan Teknis
  - b. Seksi Peralatan dan Laboratorium

**b. Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Jeneponto.**

Dalam peraturan Bupati Jeneponto Nomor 08 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan rincian Tugas Jabatan Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Jeneponto, ditegaskan bahwa Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Jeneponto adalah :

- a. Menyusun rencana Kegiatan / program Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah;
- b. Menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
- c. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d. Memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas / kegiatan bawahan;
- e. Mengoreksi dan memaraf naskah dinas;
- f. Menilai prestasi kerja bawahan;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran satuan kerja;
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kerja sama di bidang Permukiman dan Prasarana dengan instansi terkait sesuai peraturan yang berlaku;

- i. Menyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Jeneponto;
- j. Membuat sistem pembinaan dan pengembangan staf dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Jeneponto;
- k. Memotivasi bawahan bekerja secara baik di Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Jeneponto;
- l. Merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan pengawasan – umum di Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Jeneponto;
- m. Mengkoordinasikan pembinaan, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan perumahan dan gedung serta penyehatan lingkungan dan air bersih;
- n. Menetapkan kebijakan teknis dan pembinaan dalam kegiatan pelaksanaan tugas di bidang permukiman dan prasarana daerah;
- o. Mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan teknis dan penganggaran pada bidang dan seksi dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum daerah Kabupaten Jeneponto;
- p. Mengikuti rapat / pertemuan / seminar dalam rangka menerima dan memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas-tugas di Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Jeneponto;
- q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Daerah kepada atasan;
- r. Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Jeneponto dibantu oleh Sekertaris dan 4 (empat) bidang, yaitu : Bidang Pengairan, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya dan Bidang Bina Teknik. Adapun tugas pokok masing-masing sebagai berikut :

- a. Sekertariat, mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengelola administrasi yang berhubungan dengan Perencanaan, Keuangan, Administrasi Kepegawaian dan Pelaporan pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah.
- b. Bidang Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengairan yang meliputi : Perencanaan, Pengembangan Pembangunan Pengairan, Manfaat Serta Operasi dan Pemeliharaan Pengairan.
- c. Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan pembangunan/ pengembangan jalan dan jembatan termasuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan evaluasi serta pelaporan dalam bidang Kebinamargaan Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah.
- d. Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan pembangunan / pengembangan perumahan dan gedung serta penyehatan lingkungan permukiman dan prasarana air bersih termasuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan dalam Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Daerah.

- e. Bidang Bina Teknik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, penganggaran dan peralatan serta pelaporan dalam bidang Bina Teknik Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah.

Pelaksanaan tugas pokok Bagian Tata Usaha, bidang-bidang dibantu oleh masing-masing sub bagian dan seksi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kedudukannya di bawah koordinasi atasan langsung.

**c. Visi misi Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Jeneponto.**

Visi Dinas Perkerjaan umum Daerah Kabupaten Jeneponto dengan berpedoman kepada Visi Kabupaten Jeneponto menetapkan "*Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang berkelanjutan bagi masyarakat dengan tepat dan Partisipatif sesuai Karakteristik Wilayah*".

Pengertian dan makna yang terkandung dalam visi di atas dijabarkan sebagai berikut :

1. Dinas Perkerjaan umum Daerah Kabupaten Jeneponto adalah merupakan lembaga pemerintah Kab. Jeneponto yang menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat lebih sejahtera.
2. Berkelanjutan mengandung makna, bahwa sarana dan prasarana yang dibangun sesuai kebutuhan masyarakat.
3. Partisipatif, berarti setiap pembangunan sarana dan prasarana senantiasa melibatkan masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun pada tahap pengawasan.
4. Karakteristik wilayah dititik beratkan pada kondisi geografis suatu wilayah.

Berdasarkan visi tersebut di atas, maka misi Dinas Perkerjaan umum Daerah Kabupaten Jenepono adalah :

1. Meningkatkan peranan Dinas Perkerjaan umum Daerah sebagai perencana dan pelaksana pembangunan sarana dan prasarana.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Dinas Daerah guna terwujudnya penguatan kelembagaan dan pelayanan prima.
3. Meningkatkan kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Alam yang bermutu dan berwawasan lingkungan.

**d. Tujuan Dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Jenepono.**

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Jenepono bertujuan mengetahui keberhasilan atau faktor-faktor kunci keberhasilan dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Dari tujuan ini dapat dirinci dan diuraikan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan fungsi dan peranan Dinas Pekerjaan Umum Daerah sebagai salah satu lembaga yang menangani Bidang Pengairan, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya dan Bidang Bina Teknik.
- b. Mewujudkan perencanaan dan pengawasan pembangunan agar lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Mewujudkan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan agar lebih terarah, terprogram dan realistis.
- d. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan serta sikap Sumber Daya Aparatur agar lebih kompetitif.

- e. Mewujudkan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang akurat, transparan dan profesional.

Sebagaimana dipahami bahwa sasaran Rencana Startegis sangat penting karena merupakan proses perumusan dan pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu tertentu.

Oleh karena itu, sasaran Rencana Startegis Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 – 2013 sebagai berikut :

- a. Terselenggaranya koordinasi yang lebih baik antara bagian Sekertaris , Bidang Pengairan, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya dan Bidang Bina Teknik.
- b. Terwujudnya optimalisasi perencanaan Teknis dan penganggaran pembangunan yang lebih terarah, terprogram dan realistis.
- c. Terselenggaranya pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Terwujudnya optimalisasi pelaporan pelaksanaan pembangunan yang akurat, transparan dan profesional.
- e. **Program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Jeneponto.**

Program Kerja pada dasarnya merupakan usaha mengimplementasikan strategi organisasi. Program Kerja juga merupakan proses penentuan jumlah dari jenis sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan suatu rencana dan penjabaran riil tentang langkah-langkah yang diambil dalam bentuk kegiatan.

Itulah sebabnya, program didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dan pada Dinas Pekerjaan Umum

Daerah, program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Startegis Dinas Pekerjaan Umum 2008– 2013 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kebinamargaan;
2. Peningkatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keciptakarya dan Air bersih;
3. Penigkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pengelolaan sumber daya Air;
4. Peningkatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebinateknikan;
5. Peningkatan sumber daya aparatur.

Untuk mewujudkan program-program tersebut di atas, maka dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang merupakan penjabaran dari program sebagai arah pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Jeneponto.

Sebagai upaya pencapaian visi dan misi tersebut maka dibuat pokok-pokok kegiatan yang arahkan kepada :

1. Pembangunan dan Pemeliharaan jalan dan jembatan;
2. Pengawasan pekerjaan kebinamargaan;
3. Pembangunan dan pemeliharaan gedung untuk fasilitas umum;
4. Pembangunan dan Pemeliharaan jalan setapak / lingkungan;
5. Pembangunan dan Pemeliharaan instalasi air bersih;
6. Pembangunan dan Pemeliharaan Instalasi air kotor;
7. Peningkatan dan pemeliharaan kelistrikan;
8. Pembuatan sumur bor;

9. Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase;
10. Pengawasan Pekerjaan Keciaptakaryaan;
11. Pengeloaan Sumber Daya Air (PSDA);
12. Peningkatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana jaringan irigasi;
13. Pengawasan pekerjaan pengairan;
14. Penigkatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana survey dan perencanaan di Bidang Kebinamargaan, keciaptakaryaan dan Pengairan;
15. Peningkatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana alat berat dan laboratorium;
16. Peningkatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor;
17. Penngkatan keahlian di Bidang Pengadaan barang dan jasa pemerintah;
18. Peningkatan keahlian dibidang pengelolaan keuangan.

#### **B. Peran Dinas PU Dalam Pengawasan Proyek Jalan Di Desa Barana Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto**

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Jeneponto 2008-2013 merupakan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang ruang lingkupnya meliputi penetapan tujuan dan strategi organisasi yang berisikan kebijakan, program dan kegiatan di Bidang Permukiman dan Prasarana Daerah.

Oleh sebab itu Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Jeneponto merupakan dasar untuk mengukur dan meningkatkan kinerja organisasi dan menjadi kerangka acuan untuk rencana Kerja Organisasi dan Anggaran Tahunan.



Berhubung karena batasan rencana strategis yang dimulai dari penetapan tujuan sampai kepada penyusunan kegiatan untuk jangka waktu lima tahun, maka rencana kerja adalah penjabaran dari rencana strategis yang memberikan gambaran apa yang ingin dicapai oleh organisasi dalam periode satu tahun. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah perannya dalam Peran Dinas Pu Dalam Pengawasan Proyek Jalan Di Desa Barana Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. Beberapa hal tersebut adalah sebagai berikut.

### **1. Penilaian kerja proyek jalan**

Penilaian proyek jalan adalah suatu penilaian untuk mengembangkan, merencanakan serta mengarahkan tujuan dari suatu kegiatan yang dilakukan sementara, yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas dan biaya yang sudah ditentukan seperti yang ada di Dinas Pekerjaan Umum. Tujuan dari penilaian proyek jalan adalah agar proyek jalan dapat berjalan atau berkualitas dengan baik. Untuk itu, pengawasan harus sesuai atau sejalan dengan perencanaan (yang telah ditetapkan) yang akan dilaksanakan. Jika tidak, maka proyek jalan tidak akan berjalan dengan baik. Proyek jalan merupakan bagian terpenting karena dapat diciptakan suatu jalan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan akhir. Karena rencana proyek yang dapat dibuat berisi ringkasan proyek, rencana proyek, persyaratan. Hal-hal pokok yang perlu diperhatikan, perincian tugas, serta sifat kegiatan, maka diharapkan dapat tercapai koordinasi dan komunikasi yang merupakan dasar pengawasan (Buffa, 1993). Sebagaimana yang dikatakan oleh kepala Dinas Pekerjaan Umum yang mengatakan bahwa

“...Untuk tindakan penilaian pengawasan proyek jalan yang ada di desa barana, kami melakukan pengawasan yaitu untuk menyesuaikan lokasi atau

lapangan dengan perencanaan serta mobilisasi yang terdiri atas peralatan dan material dilokasi kegiatan” (Wawancara dengan AM, Tanggal 22 Mei 2014)

Senada yang dikatakan oleh kepala bidang bina marga yang mengatakan bahwa

“...Dalam melakukan penilaian pengawasan terhadap pekerjaan perkerasan dan pengaspalan kami melakukan uji lab atas pekerjaan perkerasan atau pengaspalan dan opname pekerjaan, apakah sesuai dengan gambar atau rencana anggaran belanja atau belum sama sekali” (Wawancara dengan MA Tanggal 22 Mei 2014)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jenepono dalam hal penilaian proyek jalan, dengan cara melakukan penyesuaian lokasi atau lapangan dengan perencanaan serta mobilitas yang terdiri atas peralatan dan material dilokasi kegiatan serta adanya tindakan pengawasan dengan cara pekerjaan perkerasan dan pengaspalan dengan melakukan uji lab, pengaspalan dan opname pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam tindakan pengawasan proyek jalan di Desa barana.

Tindakan pengawasan proyek jalan di desa barana merupakan bagian terpenting karena dapat diciptakan suatu jalan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan akhir. Karena penilaian proyek jalan yang dapat dibuat berisi ringkasan proyek, rencana proyek, persyaratan. Hal-hal pokok yang perlu diperhatikan, perincian tugas, serta sifat kegiatan, maka diharapkan dapat tercapai koordinasi dan komunikasi yang merupakan dasar pengawasan antara orang yang memberi wewenang dan orang yang melaksanakan wewenang tersebut. Bentuk terhadap pengawasan tersebut sedikit banyak sudah dapat terlihat

meskipun dalam pelaksanaan proyek jalan masih terdapat kendala. Tindak pengawasannya pun dilakukan secara berangsur mulai dari penilaian proyek jalan penyesuaian lokasi sampai dengan opname pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum di Desa Barana Kabupaten Bangkala.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa Barana yang mengatakan bahwa

“...Yang bertanggung jawab dalam penilaian proyek jalan di Desa Barana ini adalah semua yang terkait dalam kegiatan tersebut seperti PPK/KPA/PA, PPK, pengawas lapangan serta konsultan pengawas” (Wawancara dengan AG Tanggal 23 Mei 2014)

Dari beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Pekerjaan Umum khususnya bidang bina marga dalam hal penilaian proyek jalan di Desa Barana sudah berjalan dengan baik dengan melakukan beberapa bentuk pengawasan dalam proyek jalan yang sedang dilakukan di desa barana dengan adanya kerjasama antara pengawas lapangan dengan konsultan pengawas dalam menyelesaikan proyek jalan tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Buffa, 1993 Hal-hal pokok yang perlu diperhatikan, perincian tugas, serta sifat kegiatan, maka diharapkan dapat tercapai koordinasi dan komunikasi yang merupakan dasar pengawasan.

## **2. Pemantauan rutin proyek jalan**

Pada dasarnya pemantauan rutin proyek jalan adalah proses pengawasan proyek jalan agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai dengan rencana. Untuk itu diperlukan suatu sistem yang bisa melakukan pemantauan rutin, dalam hal ini sistem tersebut sudah ada, tinggal bagaimanakah memantau proyek jalan tersebut

agar bisa berjalan sesuai dengan rencana. Proses ini melibatkan pengawas lapangan dan konsultan pengawas yang saling bekerja sama.

Dalam pemantauan rutin jalan di Desa Barana yang terdiri dari project, material yang digunakan dan aktifitas pekerjaan proyek jalan. Penganalisaan data dilakukan secara kualitatif dimana yang dianalisa adalah data kemajuan dengan jadwal perencanaan. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa mengetahui kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki dan menjaga kinerja yang sudah baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang mengatakan bahwa

“...Dalam melakukan pemantauan proyek jalan di desa barana ini harus sesuai apa yang diharapkan tetapi sebagian lagi belum bisa terakomodir dengan baik sehingga dari panjang jalanan dari 11 Km belum terkena pengaspalan sedikitpun” (Wawancara dengan AM, Tanggal 22 Mei 2014)

Senada yang dikatakan oleh kepala desa yang mengatakan bahwa

“... Di desa barana ini cuman ada 1,5 Km yang sudah di aspal dan *paving block* hanya 500 M selebihnya itu belum ada pengaspalan yang dilakukan oleh Dinas PU dari panjang jalanan 11 Km dari mattoangi ke parang la'buang 6100 M, dari dusun mattoangi ke dusun tombolo 4 Km, dari tombolo ke dusun Bonto Kassi 3,5 Km.” (Wawancara dengan AG Tanggal 23 Mei 2014)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan perannya dalam hal obyek pengawasan di Desa Barana sudah sebagian mengalami pengaspalan dan *paving block* sepanjang 500 M, mulai dari desa mattoangi ke parang la'buang sampai dusun mattoangi ke dusun tombolo dan dari dusun tombolo ke dusun bonto kassi.

Pelaksanaan pekerjaan obyek pengawasan proyek jalan dilakukan sepenuhnya oleh kontraktor pelaksana yang telah ditunjuk dan diawasi

langsung konsultan pengawas dari Pekerjaan Umum serta bina marga. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan berdasarkan atas gambar-gambar kerja dan spesifikasi teknik umum dan khusus yang telah tercantum dalam dokumen kontrak, rencana kerja & syarat-syarat (RKS) dan mengikuti perintah atau petunjuk dari konsultan, sehingga hasil yang dicapai akan sempurna dan sesuai dengan keinginan pemilik proyek. Sebagaimana yang dikatakan oleh masyarakat Desa Barana yang mengatakan bahwa

“...Dari pengamatan saya, pemerintah dalam hal ini PU belum maksimal dalam melakukan pemantauan rutin proyek jalan di desa barana ini karena saya liat dari pihak kontraktor tidak rutin memantau yang semestinya tiap hari melakukan pengecekan tentang kemajuan pekerjaan, jalan yang sudah diperbaikipun sudah mengalami kerusakan akibat cara pekerjaannya yang tidak maksimal sehingga jalan cepat berlubang” (Wawancara dengan SA Tanggal 24 Mei 2014)

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran Pekerjaan Umum dalam melaksanakan pemantauan rutin proyek jalan tidak optimal yang seharusnya dari pihak kontraktor melakukan pemantauan setiap hari dan dari pihak pekerjaan umum tiga kali dalam seminggu, hal tersebut diakibatkan karena alat-alat yang digunakan biasa mengalami kerusakan dan faktor cuaca yang tidak menentu sehingga sebagian besar masih ada jalan yang belum mengalami pengaspalan atau *paving block*, sehingga masyarakat yang menggunakan jalan tersebut mengalami kesulitan karena harus melewati jalan yang rusak akibat belum terpantaunya dengan baik proyek jalan oleh Dinas Pekerjaan umum. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sujamto (2001:19) Pengawasan adalah

segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Pemantauan adalah kegiatan mengumpulkan informasi secara rutin, sistematis sesuai dengan rencana.

### **3. Laporan pelaksanaan proyek jalan**

Laporan pelaksanaan proyek jalan merupakan pengumpulan dan memproses data di lapangan mengenai mekanisme suatu proyek jalan yang merupakan tugas dari pengawas lapangan dan konsultan pengawas. Dalam setiap laporan-laporan pengawasan, tercantum pelaksanaan proyek jalan sampai penyelesaiannya apakah sesuai rencana dan waktu penyelesaian maka dari itu proses pengawasan sangat penting dilakukan. Hal ini berkaitan dengan sesuai tidaknya sebuah laporan-laporan dengan aturan – aturan yang telah ditentukan termasuk di dalamnya spesifikasi teknik. Oleh karena itu, proses dalam pembuatan laporan-laporan pengawasan mutlak dilaksanakan untuk menghindari terjadinya penyimpangan – penyimpangan terhadap aturan yang ada. Dalam membuat laporan-laporan pengawasan proyek jalan dinas PU yang melakukan proses pengawasan diharuskan selalu melakukan koordinasi dengan pihak – pihak terkait sehubungan dengan proses pelaksanaan dilapangan .

Laporan mempunyai peranan yang penting pada suatu organisasi karena dalam suatu organisasi dimana hubungan antara atasan dan bawahan merupakan bagian dari keberhasilan organisasi tersebut. Dengan adanya hubungan antara perseorangan dalam suatu organisasi baik yang berupa hubungan antara atasan dan bawahan, ataupun antara sesama karyawan yang terjalin baik maka akan bisa

mewujudkan suatu sistem *delegation of authority* dan pertanggungjawaban akan terlaksana secara efektif dan efisien. Kerja sama diantara atasan bawahan bisa dilakukan, dibina melalui komunikasi baik komunikasi yang berbentuk lisan maupun tulisan (laporan). Agar laporan tersebut bisa efektif mempunyai syarat-syarat yang perlu dipenuhi demi terbentuknya laporan yang baik maka seseorang perlu mengetahui secara baik bagaimana pembuatan format laporan yang sempurna. Sehingga dengan laporan yang terformat bagus akan bisa bermanfaat baik dalam komunikasi maupun dalam mencapai tujuan. Hal-hal yang perlu dilaporkan oleh pihak pengawas adalah kemajuan pekerjaan, apa saja kegiatan yang berlangsung, laporan harian tentang proyek jalan serta kemajuan dari kegiatan proyek jalan. Sebagaimana yang dikatakan oleh kepala bidang Bina Marga yang mengatakan bahwa

”...Laporan-laporan pengawasan yaitu serah terima lapangan dari pihak proyek kepihak rekanan, pemeriksaan kondisi awal lapangan apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak, jika sesuai pekerjaan dilanjutkan, jika tidak sesuai maka dibuatkan berita acara perubahan dan sop drawing” (wawancara dengan MA, Pada tanggal 22 Mei 2014)

Senada dengan yang dikatakan oleh pengawas proyek jalan yang mengatakan bahwa

”...Pelaksanaan pekerjaan diawasi oleh pengawas lapangan dan konsultan pengawas dimana setiap bulan dilaporkan pekerjaannya, saat pekerjaan selesai dilakukan serah terima dari pihak rekanan kepihak proyek melalui tim serah terima (*profisional hand over*)”(Wawancara dengan MA, pada tanggal 23 Mei 2014)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran pengawas lapangan dan konsultan pengawas dalam hal laporan-laporan pengawasan dengan

melakukan beberapa cara yaitu adanya serah terima lapangan dari pihak proyek ke pihak rekanan serta pemeriksaan kondisi awal yang ada di lapangan akan dibuatkan sebuah laporan pengawasan proyek jalan yang dimana laporan-laporan yang dibuat diawasi oleh pengawas lapangan dan konsultan setiap bulan dilaporkan pekerjaannya melalui tim serah terima.

Selama proses laporan pengawasan berlangsung, pengawas harus selalu mencatat semua kejadian yang berlangsung di lapangan pada lembar Laporan Harian yang menjadi laporan pengawas yang akan diserahkan kepada atasan. Setelah itu dilanjutkan dengan mengisi Laporan Mingguan. Laporan harus selalu dibuat untuk mengetahui dengan pasti volume yang telah dicapai, sehingga dapat dipantau perkembangan dari pekerjaan tersebut. Apapun yang terjadi di lapangan yang berhubungan dengan pekerjaan, wajib dikoordinasikan dengan anggota direksi yang lain termasuk dengan ketua direksi dan Pejabat Pembuat Komitmen yang membidangnya. Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh pihak kontraktor dilakukan setiap hari dan dari pihak PU dilakukan tiga kali dalam seminggu.

Sebagaimana hasil wawancara dari staf Pekerjaan Umum yang mengatakan bahwa

“...Dilakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut apakah sudah memenuhi panjang, lebar tebal dan volume besaran perangkap lainnya, hal itu dibuktikan dengan berita acara pekerjaan dan berita acara kemajuan pekerjaan serta berita acara serah terima satu dalam tengang waktu serah terima satu dan serah terima dua (final) ada tanggung jawab rekanan untuk tetap memelihara pekerjaannya” (wawancara dengan IR, Pada tanggal 22 Mei 2014)



Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran Pekerjaan Umum dalam membuat laporan-laporan pengawasan sudah tersusun secara sistematis sesuai dengan laporan-laporan yang ada dilapangan mengenai proyek jalan yang ada di desa barana yang disesuaikan dengan apa yang ada dikontrak atau rencana anggaran belanja sesuai dengan proses kerja yang terjadi dilapangan. Dimana laporan adalah Suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis dari bawahan kepada atasan sesuai dengan hubungan wewenang (*authority*) dan tanggung jawab (*responsibility*) yang ada antara mereka.

### **C. Faktor Yang Mempengaruhi Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pengawasan Proyek Jalan Didesa Barana Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto**

Dalam pengawasan proyek jalan di Desa Barana Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik itu faktor penghambat maupun faktor pendukung. Faktor-faktor ini harus dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum selaku pihak yang berperan dalam pengawasan proyek jalan di Desa Barana Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

#### **1. Faktor Pendukung dalam pengawasan proyek jalan di Desa Barana Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto**

##### **a. Anggaran biaya proyek jalan.**

Anggaran biaya proyek jalan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengelolaan proyek jalan yang sedang berlangsung. Rendah atau tingginya biaya akan mempengaruhi terhadap proses awal proyek tepatnya pada saat tender. Sehingga diperlukan kecermatan dalam penyusunan anggaran proyek jalan, yang di dalamnya membutuhkan pengalaman untuk mengestimasi nilai sebuah proyek

jalan yang sedang dilakukan di desa barana kecamatan bangkala kabupaten jenepono.

Dalam menaksir atau menentukan nilai suatu proyek tidaklah mudah, kompleksnya jenis pekerjaan serta penggunaan tenaga, bahan dan alat yang berbeda-beda menambah tingkat kompleksitas dalam penyusunan rencana anggaran biaya (RAB) dan *time schedule* suatu proyek. Pengetahuan mengenai biaya proyek yang akan dilaksanakan sangat penting bagi para kontraktor dan pemilik proyek. Bagi para kontraktor, pengetahuan tersebut bermanfaat untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang akan diajukan ke pemilik proyek untuk memenangkan *tender*. Sedangkan bagi pemilik proyek, pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk mempertimbangkan kelayakan dan kerealistisan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan oleh masing-masing kontraktor dan untuk proyek jalan di Desa Barana ini jumlah anggaran yaitu Rp 2.007.895.000 (dua milyar tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Sebagaimana yang dikatakan oleh kepala Dinas Pekerja Umum yang mengatakan bahwa

“...Dalam proyek jalan yang sedang berlangsung tentunya sudah ada biaya yang sudah tersedia untuk pembiayaan proyek jalan yang ada di Desa Barana, dan selanjutnya diserahkan kepada yang berwenang untuk mengatasi dan mengawasi proyek jalan tersebut”(wawancara dengan AM, Pada tanggal 22 Mei 2014)

Senada yang dikatakan oleh kepala Bina Marga yang mengatakan bahwa

“...Untuk pembiayaan proyek jalan yang ada di Desa Barana diserahkan kepada kontraktor yang melaksanakan pekerjaan jalan yang ada di Desa Barana, dan tentunya biayanya sudah tersedia sesuai dengan kebutuhan” (Wawancara dengan MA, pada tanggal 22 mei 2014)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa peran pemerintah dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugasnya dalam hal ketersediaan biaya yang

dimana biaya untuk proyek jalan yang ada di Desa Barana Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto biayanya itu diserahkan kepada kontraktor yang melaksanakan pekerjaan jalan sebagai bentuk pengawasan terhadap proyek jalan yang sedang berjalan.

Dalam pengawasan jalan yang ada di Desa Barana Kecamatan Bangkala Kabupten Jeneponto faktor yang mempengaruhi lancarnya pelaksanaan suatu proyek jalan. Salah satunya adalah ketersediaan dana untuk membiayai pelaksanaan proyek jalan. Suatu proyek jalan akan sulit terwujud apabila tidak tersedia cukup dana untuk membiayainya. Sebaliknya, suatu proyek konstruksi akan berjalan lancar apabila dana yang dibutuhkan terpenuhi. Sebagaimana yang dikatakan oleh pengawas proyek jalan yang mengatakan bahwa

“... Biaya yang disediakan untuk proyek jalan yang ada di Desa Barana itu disediakan oleh pemerintah kemudian diserahkan kepada kontraktor yang melakukan pekerjaan jalan” (Wawancara dengan MA, Pada tanggal 22 Mei 2014)

Melihat beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah khususnya Dinas Pekerjaan Umum dalam hal anggaran biaya sudah maksimal, dimana biaya untuk proyek jalan diserahkan kepada kontraktor sebagai pengawas atau pelaksana dari pekerjaan proyek jalan yang ada di Desa Barana Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Karena pada dasarnya Besarnya estimasi biaya yang diperlukan untuk merealisasikan suatu proyek Jalan harus sudah diketahui terlebih dahulu sebelum proyek berjalan agar dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek jalan tersebut dapat dipersiapkan. Apabila dana untuk pelaksanaan proyek jalan sudah dipersiapkan sejak awal maka

kemungkinan terhentinya proyek di tengah jalan akibat kekurangan dana dapat diminimalisir.

### **b. Sumber Daya Manusia**

Peranan Sumber Daya Manusia Yang dibangun atau dikembangkan melalui proses pembangunan dari SDM itu dapat dipertanyakan, apanya dari SDM itu yang harus dibangun sehingga terwujud manusia seutuhnya atau manusia yang berbobot atau yang berkualitas sesuai dengan hakikat dan sasaran proyek jalan yang ada di Desa Barana Kecamatan Bangkala dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Karena yang perlu dibangun adalah daya yang berasal atau bersumber dari manusia itu atautkah manusia yang menghasilkan daya itu yang harus dibangun atau dikembangkan. Berikut adalah daftar pegawai Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga.

Tabel 2. Daftar nama pegawai dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga.

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PENDIDIKAN</b>
1	Rahmat Makmur,SE.MM	Kepala Bidang	S2/Manajemen
2	Ikrar, SE	Kasi Jalan dan Jembatan	S1/Ekonomi
3	Budi Taufik, ST.MM	Kasi Pemeliharaan Jalan & Jembatan	S2/Manajemen
4	Muh. Irwan HR, SHi.MM	Staf	S2/Manajemen
5	Iqbal SN, SE	Staf	S1/Ekonomi
6	A. Nur Israwati Ibrahim, SE	Staf	S1/Ekonomi
7	Syafruddin. MS, ST	Staf	S1/Teknik Sipil
8	Adnan Ahmad, ST	Staf	S1/Teknik Sipil

9	Andi Erwin. BP, ST	Staf	S1/Teknik Sipil
10	Anugrah Hardianti,ST	Staf	S1/Teknik Sipil
11	Suhartono, SE.MM	Staf	S2/Manajemen
12	Sri Sulastri, ST	Staf	S1/Teknik Sipil
13	A. Achriani Edyta	Staf	SMA Sederajat
14	Taufiq Syam	Staf	SMA Sederajat
15	Nurmiati	Staf	SMA Sederajat
16	Manggaukang	Staf	SMA Sederajat

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Jeneponto

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga berjumlah 16 orang dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda yaitu pegawai yang berpendidikan S2/Manajemen berjumlah 4 orang , S1/Ekonomi 3 orang dan S1/Teknik Sipil 5 orang, dan SMA Sederajat 4 orang. Sedangkan untuk tenaga ahli yang diperlukan dalam proyek jalan terdapat 4 orang dengan latar belakang pendidikan S1 Teknik Sipil seperti tabel dibawah ini.

Tabel 3. Tenaga ahli yang diperlukan dalam proyek jalan.

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM PROYEK</b>	<b>PENDIDIKAN</b>
1	Ir. Muhammad Ramli, HS	Site Engineer	S1/Teknik Sipil
2	Syamsul Marlin Amir	Inspector	S1/Teknik Sipil
3	Andi Islamiuddin	Surpeyor	S1/Teknik Sipil
4	Zainal Ismail	Mat. Technician	S1/Teknik Sipil

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Jeneponto

Berikut adalah daftar nama pengawas jalan terhadap proyek jalan di Desa Barana Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto

Tabel 4. Nama-nama pengawas jalan di Desa Barana.

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PENDIDIKAN</b>
1	Manggaukang	Pengawas Jalan	S1/Teknik Sipil
2	Mustar, SE	Pengawas Jalan	S1/Ekonomi

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Jeneponto

Menurut Hasibuan (2003 : 244) Sumber Daya Manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Sumber Daya Manusia atau man power di singkat SDM merupakan yang dimiliki setiap manusia . SDM terdiri dari daya fikir dan daya fisik setiap manusia. Tegasnya kemampuan setiap manusia ditentukan oleh daya fikir dan daya fisiknya. SDM atau manusia menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Sebagaimana yang dikatakan oleh kepala dinas Pekerjaan Umum yang mengatakan bahwa

“...Untuk sumber daya manusia yang ada di Dinas Pekerjaan Umum khususnya dalam hal pengawas ada dua orang dengan tingkat pendidikan sarjana ekonomi dengan sarjana teknik” (Wawancara dengan AM, Pada tanggal 22 Mei 2014)

Senada yang dikatakan oleh kepala bidang Bina Marga yang mengatakan bahwa

“... Sumber daya manusia yang ada di Bina Marga telah sesuai dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum sehingga mereka lebih paham dengan apa-apa yang ada dilakukan dalam melakukan pengawasan terutama pengawasan proyek jalan karena tenaga ahli yang ada dengan status pendidikan sarjana teknik sipil profesi struktur bangunan”(Wawancara dengan MA, Pada tanggal 22 Mei 2014)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat SDM yang ada di dinas pekerjaan umum khusus bina marga tidak terlepas perhatian

pemerintah terhadap kualitas aparatur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto untuk melaksanakan tugasnya dalam pengawasan proyek jalan di Desa Barana Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto sudah maksimal, melihat tingkat sumber daya manusia yang ada di dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga ketersediaan sudah cukup dengan latar belakang pendidikan mayoritas dari teknik sipil profesi struktur bangunan. Karena pada dasarnya tingkat keberhasilan pengawasan jalan yang ada di desa barana tergantung pada kualitas SDM aparatur yang menangani pengawasan jalan tersebut.

Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu staf yang ada di Dinas Pekerjaan Umum yang mengatakan bahwa

“...Untuk masalah sumber daya manusia dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum tidak diragukan lagi karena disiplin ilmu yang mereka miliki telah sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan sehingga tidak ada hal-hal yang bias keluar dari koridor atau sistem yang telah ditetapkan oleh dinas Pekerjaan Umum”(wawancara dengan IR, Pada tanggal 22 Mei 2014)

Penjelasan diatas sangat jelas bahwa Dinas Pekerjaan Umum sangat memperhatikan keikutsertaan sumber daya manusia dalam proses pengawasan proyek jalan dengan ilmu yang di milikinya sebagai aparatur pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto, karena dengan berperannya SDM dalam pengawasan proyek jalan, maka pengawasan proyek jalan yang dilakukan akan lebih muda. Karena SDM sedikit banyaknya mengetahui bagaimana pengawasan proyek jalan.

SDM memiliki peran yang sangat penting dalam usaha pengawasan proyek jalan, khususnya proyek jalan yang ada di Desa Barana Kecamatan

Bangkala Kabupten Jeneponto. Seperti yang dikatakan oleh Hasibuan (2003;244) Sumber Daya Manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Tanpa adanya SDM yang unggul, maka yakinlah pengawasan proyek jalan akan berjalan sangat lamban, bahkan bisa mengalami kegagalan.

## 2. Faktor penghambat dalam pengawasan proyek jalan

### a. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana pengawasan proyek jalan merupakan pelengkap dari pengawasan itu sendiri yang diperlukan untuk melayani kebutuhan pekerjaan proyek jalan. Pembangunan sarana dan prasarana pengawasan jalan di daerah tujuan harus disesuaikan dengan kebutuhan pengawas proyek jalan baik secara kuantitatif dan kualitatif.

Tabel 5. Sarana dan Prasarana proyek jalan

Sarana	Satuan	Prasarana	Satuan
Motor	1 Unit	Jembatan	M3
Mobil	1 Unit	Tembok penahan	M3
Escavator	1 Unit	Drainase aspal	M3
Kompresor sibrator	1 Unit	Paving block	M3
Mobil tangki air	1 Unit	Pasir	M3
Sprayer aspal	1 Unit	Batu kali/kerikil	M3
Truk	1 Unit	Aspal cement	KG
		Agregat kasar/halus	M3
		Sirtu	M3



		Cat marka	KG
		Paku	KG
		Semen	ZAK

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Jeneponto

Sarana pengawasan proyek jalan sebagai ujung tombak pengawasan dapat diartikan sebagai usaha yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengawasan kepada pekerja jalan pada suatu daerah tujuan dimana keberadaannya sangat tergantung kepada pengawas. terkait dengan penataan infrastruktur jalan dan mencapai target, mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial. Sebagaimana yang dikatakan oleh kepala Dinas Pekerjaan Umum yang mengatakan bahwa

“...Salah satu yang menjadi penghambat dalam pengawasan proyek jalan adalah kurangnya sarana dan prasana dikarenakan dana untuk sarana dan prasarana tidak ada akan tetapi kami terus berusaha agar sarana dan prasarana di tambah guna mempermudah dalam proses pengawasan proyek jalan sehingga sesuai dengan apa yang kami harapkan”(Wawancara dengan AM, pada tanggal 22 Mei 2014)

Senada yang dikatakan oleh kepala Bidang Bina Marga yang mengatakan bahwa

“...Untuk penyediaan sarana dan prasarana di yang ada disini seperti fasilitas masih kurang apa lagi fasilitas yang ada sudah sebagian tidak berfungsi lagi, kami keterbatasan dana dalam penyediaan sarana dan prasaran sehingga untuk melengkapi fasilitas di sini masih lamban”(Wawancara dengan MA, pada tanggal 22 Mei 2014)

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa dinas pekerjaan umum masih butuh sarana dan prasarana yang mampu membantu pemerintah agar pengawasan

proyek jalan yang dilakukan lebih maksimal. Walaupun sarana dan prasarana yang ada di dinas pekerjaan umum masih terbatas itu tidak mengurangi semangat pemerintah dalam melakukan pekerjaannya terutama dalam pengawasan terhadap proyek jalan. Seperti yang dikatakan oleh Wahab (1997:74-77) bahwa sarana pada dasarnya menyediakan akomodasi, sarana dan fasilitas kelengkapan daerah tujuan untuk dapat menarik minat seseorang. Infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam mobilitas, distribusi barang, penumpang dan jasa. Infrastruktur jalan yang baik akan memberikan dukungan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya. Infrastruktur jalan hingga saat ini masih memegang peranan penting sebagai prasarana transportasi darat di Indonesia, hampir 90 % distribusi barang menggunakan moda jalan. Infrastruktur jalan akan mengalami kerusakan, baik sebagai akibat penggunaan jalan tersebut untuk lalu lintas kendaraan, cuaca yang mempengaruhi kinerja perkerasan atau faktor kinerja perkerasan jalan itu sendiri. Data beban sumbu kendaraan merupakan salah satu input data yang diperlukan dalam perencanaan, pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur jalan.

#### **b. Biaya pengawasan kurang**

Dana dalam pengawasan proyek jalan sangat penting. Setiap pengawasan proyek jalan membutuhkan dana yang besar dalam melakukan suatu pengawasan. Karena pengawasan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mampu mempertahankan pengawasan yang telah dilakukan maupun yang baru dilakukan. Untuk pengawasan proyek jalan yang dilakukan di desa Barana kabupaten Jenepono tersebut. Ketika semua itu tidak terpenuhi, maka pengawasan proyek jalan tersebut akan berjalan lambat. Dan ini yang menjadi masalah yang dihadapi

dalam pengawasan proyek jalan di desa barana kecamatan bangkala kabupaten jeneponto. Sebagaimana yang dikatakan oleh kepala dinas pekerjaan umum yang mengatakan bahwa

“...Untuk biaya pengawasan proyek jalan masih kurang, tidak adanya dana yang cukup disediakan sehingga untuk pengawasan jalannya pun masih sedikit lamban”(Wawancara dengan AM, pada tanggal 22 Mei 2014)

Senada yang dikatakan oleh kepala bidang bina marga yang mengatakan bahwa

“...Untuk pengawasan proyek jalan masih mengalami hambatan dikarenakan biaya untuk pengawasan kurang ini mengakibatkan pengawasan proyek jalan sedikit lamban dari pengawasan-pengawasan yang dilakukan selama ini” (Wawancara dengan MA, Pada tanggal 22 Mei 2014)

Dari hasil wawancara diatas bahwa peran dinas pekerjaan umum dalam hal kurangnya biaya pengawasan terhadap pengawasan proyek jalan masih kurang, dikarenakan kurangnya biaya untuk proses pengawasan di desa barana kecamatan bangkala sehingga pengawasannya pun sedikit terhambat. Titik berat dari biayanya pengawasan adalah pada infrastruktur dengan peningkatan pembangunan jalan. Keterbatasan dana untuk pembangunan infrastruktur jalan dari pemerintah yang menyebabkan belum bisa terpenuhinya seluruh kebutuhan pembangunan jalan baik itu pembukaan jalan baru, peningkatan jalan, maupun rehabilitasi jalan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh pengawas proyek jalan yang mengatakan bahwa

“.... Salah satu yang menjadi faktor penghambatnya jalannya proses pengawasan jalan adalah kurangnya dana dalam melakukan pengawasan jalan khususnya di Desa Barana Kecamatan Bangkala sehingga

pekerjaannya pun mendapat kendala” (Wawancara dengan MA, Pada tanggal 23 Mei 2014)

Melihat beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan peran dinas pekerjaan umum masih mengalami kendala dalam proses pengawasan proyek jalan di Desa Barana Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, dimana kurangnya biaya dalam pengawasan proyek jalan sehingga mengalami keterhambatan. Keterbatasan dana dalam pengawasan jalan dan sejumlah ruas jalan di wilayah Desa Barana masih dalam kondisi rusak dan tidak layak dilalui kendaraan.

### **c. Kurangnya personil pengawas lapangan**

Pengawas adalah pihak yang dipilih oleh pemilik proyek untuk melaksanakan pengawasan jalan, pengawas dapat berupa badan usaha atau perorangan. Perlu sumber daya manusia yang ahli dibidangnya seperti teknik sipil, arsitektur, listrik dan lain-lain sehingga proses pengawasan dapat berjalan dengan lancar dengan baik dan cepat.

Pengawas jalan biasanya diadakan pada proses pengawasan jalan, seorang pengawasan jalan mengawasi mulai dari perencanaan proyek jalan sampai dengan berakhirnya proses proyek jalan tersebut, didalam proyek jalan harus adanya kerjasama antara kontraktor dengan pengawas jalan sehingga ada kesinambungan didalamnya yang akan menghasilkan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan yang diinginkan sehingga tidak akan adanya kerugian antara pihak pengawas dan pihak kontraktor dalam hal ini pengawasan jalan didesa barana kecamatan bangkala

kabupaten jeneponto. Sebagaimana yang dikatakan oleh kepala Dinas Pekerjaan Umum yang mengatakan bahwa :

“...Pengawas yang ditempatkan oleh Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan pengawasan terhadap proyek jalan yang ada di Desa Barana itu kami batasi untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan sehingga tidak adanya pemborosan anggaran dan pengawas yang ada hanya 2 orang” (Wawancara dengan AM, Pada tanggal 22 Mei 2014)

Senada yang dikatakan oleh pengawas proyek jalan yang mengatakan bahwa

“...Saya sebagai pengawas merasa sangat kewalahan dalam melakukan pengawasan proyek jalan yang ada di Desa Barana karena kami hanya berdua yang ditugaskan untuk mengawasi proyek tersebut. Hal itu yang biasa memperlambat pelaporan hasil kerja”(Wawancara dengan MA, Pada tanggal 23 mei 2014)

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran kepala Dinas Pekerjaan Umum dalam hal kurangnya personil pengawasan sangatlah kurang karena personil yang seharusnya diperbanyak agar pengawasan dapat berjalan dengan maksimal. Dengan kurangnya personil pengawasan terhadap proyek jalan di desa barana dapat mengakibatkan pengawasan yang kurang optimal karena banyak tugas yang harus dilaksanakan dalam waktu tertentu.

#### **d. Keterlambatan penyelesaian proyek jalan.**

Keterlambatan penyelesaian proyek jalan dapat disebabkan dari kontraktor maupun berasal dari *owner*. Keterlambatan juga dapat terjadi tetapi tidak disebabkan kedua pihak tersebut. Keterlambatan proyek konstruksi berarti bertambahnya waktu pelaksanaan penyelesaian proyek yang telah direncanakan

dan tercantum dalam dokumen kontrak. Penyelesaian pekerjaan tidak tepat waktu merupakan kekurangan dari tingkat produktivitas dan sudah barang tentu kesemuanya ini akan mengakibatkan pemborosan dalam pembiayaan, baik berupa pembiayaan langsung yang dibelanjakan untuk proyek-proyek pemerintah, maupun berwujud pembengkakan investasi dan kerugian-kerugian pada proyek-proyek swasta.

Keterlambatan penyelesaian proyek jalan seringkali menjadi sumber perselisihan dan tuntutan antara pemilik dan kontraktor, sehingga akan menjadi sangat mahal nilainya, baik ditinjau dari sisi kontraktor maupun pemilik. Kontraktor akan terkena denda penalti sesuai dengan kontrak. Di samping itu, kontraktor juga akan mengalami tambahan biaya *overhead* selama proyek masih berlangsung. Dari sisi pemilik, keterlambatan proyek akan membawa dampak pengurangan pema-sukan karena penundaan pengoperasian fasilitasnya. Keterlambatan penyelesaian proyek dapat dihindari atau dikurangi apabila pengkajian jadwal proyek dilakukan dengan baik. Peran aktif manajemen merupakan salah satu kunci utama keberhasilan pengelolaan proyek. Sebagaimana yang dikatakan oleh kepala Dinas Pekerjaan Umum yang mengatakan bahwa

“...Keterlambatan penyelesaian proyek berakibat naiknya *overhead*, karena bertambah panjangnya waktu pelaksanaan. Biaya *overhead* meliputi biaya untuk perusahaan secara keseluruhan, terlepas ada tidaknya kontrak yang sedang ditangani” (Wawancara dengan AM, Pada tanggal 22 Mei 2014)

Senada yang dikatakan oleh kepala bina marga yang mengatakan bahwa

“.....Bagi Pihak konsultan akan mengalami kerugian waktu, serta akan terlambat dalam mengerjakan proyek yang lainnya, jika pelaksanaan proyek mengalami keterlambatan penyelesaian dan bagi Pihak *owner* Keterlambatan proyek pada pihak pemilik/*owner*, berarti kehilangan penghasilan dari jalan yang seharusnya sudah dapat digunakan”(wawancara

dengan MA, Pada tanggal 22 Mei 2014)

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran kepala Dinas Pekerjaan Umum dalam hal keterlambatan proyek harus dapat dimaksimalkan sebaik mungkin agar tidak banyak pihak yang dirugikan dengan keterlambatan proyek jalan di Desa Barana dan juga agar tidak mengeluarkan anggaran tambahan akibat keterlambatan proyek.

Kontraktor yang mengerjakan proyek tepat waktu, tentu akan menguntungkan kedua belah pihak. Dalam rangka mendapatkan posisi sebagai perusahaan yang baik dan selalu tepat waktu dalam penyelesaian proyek, selalu diupayakan suatu metode untuk menghindari keterlambatan yang terjadi di dunia proyek jalan. Berbagai cara telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan konstruksi untuk menghindari keterlambatan penyelesaian proyek jalan, misalnya mengerjakan keseluruhan pekerjaan jalan (tanpa dikerjakan oleh subkontraktor), maupun memberdayakan sumber daya manusia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto dalam hal tindakan pengawasan, dengan cara melakukan penyesuaian lokasi atau lapangan dengan perencanaan serta mobilitas yang terdiri atas peralatan dan material dilokasi kegiatan serta adanya tindakan pengawasan dengan cara pekerjaan perkerasan dan pengaspalan dengan melakukan uji lab, pengaspalan dan opname pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam tindakan pengawasan proyek jalan di Desa barana, adapun faktor pendukung dalam Peran Dinas PU Dalam Pengawasan Proyek Jalan di Desa Barana Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto yaitu anggaran biaya proyek jalan dan sumber daya manusia sedangkan faktor penghambat yaitu sarana dan prasarana, biaya pengawasan kurang, kurangnya personil pengawas lapangan dan keterlambatan penyelesaian proyek jalan.

#### **B. Saran**

1. Pengawas jalan di berikan fasilitas sehingga dalam melaksanakan tugasnya dapat berjalan lancar.
2. Diperlukan adanya perbaikan dan peningkatan mutu sarana dan prasarana pekerjaan umum yang sudah ada saat ini.
3. Agar dalam pengawasan dalam proyek jalan lebih ditingkatkan lagi supaya target penyelesaian proyek dapat berjalan dengan baik.



4. Agar dalam melakukan suatu pengawasan perlu adanya personil yang memadai dan berkualitas agar proses pengawasan berjalan sesuai keinginan.
5. Melakukan pembenahan dalam struktural dinas pekerjaan umum agar semua pegawai dan pengawas dapat bekerja dengan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2010. *Pengawasan proyek jalan*. [http://eproc.pu.go.id/publik/eproc2013/kegiatan/info\\_kegiatan.asp?satker={1498D388-1D96-43AE-9832-BD0BFD71BD4D}](http://eproc.pu.go.id/publik/eproc2013/kegiatan/info_kegiatan.asp?satker={1498D388-1D96-43AE-9832-BD0BFD71BD4D}). Diakses pada tanggal 22 mei 2014.
- Anonim. 2011. *Pengawasan dan pengendalian*. <http://www.ilmusipil.com/pengawasan-dan-pengendalian-mutu-pekerjaan-proyek>. Diakses pada tanggal 14 April 2014.
- Anonim. 2013. *Tugas dan fungsi bina marga*.<http://dinaspubintan.blogspot.com/2013/03/tugas-pokok-dan-fungsi-bidang-bina.html>. Diakses pada tanggal 24 April 2014.
- Handayani, Soewarno. 1990. *Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Gunung Agung.
- Makmur . 2011.*Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Aditama. Bandung.
- Nawawi, 1994. *Pengawasan melekat pada lingkungan aparatur pemerintah*. Jakarta: Erlangga.
- Rahman. 2012. *Pengawasan Proyek Jalan Kabupaten oleh Dinas Bina Marga, Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*.
- Sakapurnama E, dkk. 2012.*Membuka Informasi Menuju Good Governance*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sari. 2012. *Prinsip-prinsip pengawasan*. [http://candranopitasari.blogspot.com/2012/01/pengertian-tujuan-dan-prinsip-prinsip\\_pengawasan.12.html](http://candranopitasari.blogspot.com/2012/01/pengertian-tujuan-dan-prinsip-prinsip_pengawasan.12.html). Diakses pada tanggal 27 April 2014.
- Siagian, S.P. 1996. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soetomo, dkk. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Suharsaputra U, 2012. *Metode Penelitian*. Aditama. Bandung.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Sujatmo, 1986. *Beberapa pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Balai Aksara.

Pane, Iqbal. 2012 Kumpulan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Tentang Jalan, *pedoman Jalan Daerah Kementrian PU.*

Peraturan Menteri PU Nomor 08/PRT/M/2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum

Victor M. situmorang. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat: Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah.* Jakarta: Rineka Cipta

Winardi, 2013, *Azas-azas Manajemen,* Bandung: Mandar Maju

..... 2013. Manajemen Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi, *Jurnal Manajemen Pelaksanaan Proyek.*